

SOSIAL, POLITIK, DAN EKONOMI KESEJAHTERAAN SOSIAL: REFLEKSI DEMOKRASI DAN FENOMENA SOSIAL INDONESIA

Reza Ardiansyah Pradana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
rezaardiansyahpr@gmail.com

Doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3717

Abstract

In an effort to understand social welfare, a multidimensional framework from a social, political and economic perspective is needed. The social perspective will show how society on an individual and community basis is an important part of social welfare studies. With sociological approaches such as Max Weber and Pierre Bourdieu in the analysis of society and even politics, this paper shows that anthropology in seeing the phenomenon of welfare is not quite right. Then in the realm of politics, this paper seeks to present the side of public policy and social policy resulting from the political process and how democracy works in its transition and circumstances. The economy is seen from both global and local perspectives as a reality of the world phenomena that have occurred regarding the 1997 and 2008 recessions, then the neoliberalism regime, and then how the alternative welfare proposed by some thinkers is presented in this paper.

Keywotrd: Anthropology-Sociology, Social Policy, Public Policy, Social Welfare, Welfare State, and Democracy.

Abstrak

Upaya memahami kesejahteraan sosial diperlukan kerangka multidimensional dari persepektif sosial, politik, dan ekonomi. Perspektif sosial akan memperlihatkan bagaimana masyarakat dalam basis individual maupun komunitas merupakan bagian penting daripada studi kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan sosiologis seperti Max Weber dan Pierre Bourdieu dalam analisa tentang masyarakat dan bahkan politik, tulisan ini memperlihatkan bahwa antropologisme dalam melihat fenomena kesejahteraan kurang tepat. Kemudian dalam ranah politik tulisan ini berupaya menampilkan sisi kebijakan publik dan kebijakan sosial yang dihasilkan dari proses politik dan bagaimana demokrasi bekerja dalam transisi maupun keadaannya. Adapun ekonomi dilihat dari kacamata global maupun lokal sebagai suatu kenyataan dari fenomena-fenomena dunia yang telah terjadi mengenai resesi 1997 dan 2008, kemudian rezim neoliberalisme, dan kemudian bagaimana alternatif kesejahteraan yang dikemukakan oleh beberapa pemikir coba ditampilkan dalam tulisan ini.

Kata Kunci: Antropologis-Sosiologis, Kebijakan Sosial, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Sosial, Negara Kesejahteraan, dan Demokrasi.

Pendahuluan

Membicarakan perihal kesejahteraan sosial atau *social welfare* memang memerlukan instrumen multidimensional untuk memahami secara komprehensif dan koheren isu-isu terkini maupun fenomena sosial yang terjadi. Dalam beberapa literatur yang menggambarkan kesejahteraan sosial terlihat bagaimana *social address* menjadi sokongan utama dalam menjelaskan permasalahan maupun solusi dari tema sentral kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan, maupun kebijakan publik. Akan tetapi permasalahan dasar daripada fenomena sosial Indonesia adalah pandangan yang relatif antropologis ketimbang sosiologis. Hal tersebut tentu bertentangan dengan maksud sosial maupun politik dari tujuan-tujuan diadakannya maupun diselenggarakannya kebijakan kesejahteraan sosial.

Memahami kesejahteraan sosial melalui kebijakan publik dan kebijakan sosial juga memerlukan komparasi yang beragam mengingat kini Indonesia hidup di tengah negara-dunia yang beragam. Upaya penelusuran akar kesejahteraan sosial secara global maupun lokal tetap dilihat dari konstruksi sosial yang berlaku sebagaimana aspek-aspek itu menjadi penting untuk menjelaskan atau menggambarkan persoalan. Kebijakan yang banyak terkait dengan kesejahteraan sosial juga sifatnya begitu riuh dan ramai seperti kesehatan, asuransi, jaminan, maupun pekerjaan yang basisnya lebih dekat dengan ekonomi. Namun pendekatan sosial terkait dengan diferensiasi akibat dari suatu wacana maupun fenomena memiliki tempat yang kuat dan kokoh dalam menjawab persoalan.

Konstruksi sosial bersifat unik dan dinamis, tidak ada suatu konstruksi yang bersifat universal. Ada distingsi antara Indonesia dalam lingkup Asia dan Asia Tenggara dengan cerminan beberapa literatur yang banyak menggambarkan Eropa atau Amerika Serikat. Maka dalam permasalahan sosial dan politik pun akan terlihat bagaimana mentalitas politik bekerja sebagaimana kritik dari proses politik yang telah dialami oleh negara-negara yang unik tersebut. Sebagaimana dalam istilah komparasi informasi pengetahuan maka tidak hanya berkaitan dengan kebijakan atau keputusan yang diambil melainkan bagaimana dasar konstruksi sosial itu menjadi cerminan upaya proses kesejahteraan maupun kekurangan yang terjadi.

Dalam upaya memahami kesejahteraan sosial ke dalam politik maka diskursus yang muncul untuk menjelaskan hal itu adalah negara kesejahteraan atau *welfare state*. Dalam kasus seperti ini ilmu politik kembali hadir dengan menekankan negara sebagai aktor utama bahkan aktor rasional, akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan bertambah banyaknya persoalan *welfare state* dilihat pula dari isu-isu strategis seperti demokrasi, keterlibatan sipil dalam politik, etika politik, maupun ekonomi-politik yang sebetulnya menjadi perhatian utama dalam kasus kesejahteraan sosial. Demokrasi menjadi elemen penting dalam menjelaskan fenomena mengapa di tengah cita-cita persamaan dan pembangunan justru ada ketimpangan dan ketidakberesan politik setelah proses politik panjang dilalui.

Adapun kesulitan yang dialami ketika menyelami literatur kesejahteraan sosial secara lokal,

internasional, maupun komparatif adalah sulitnya memahami dimensi yang abstrak juga berkelindan terkait Indonesia sendiri yang coba dijelaskan melalui teori-teori yang tepat. Dalam menjelaskan perbandingan misalnya, literatur mengenai negara kesejahteraan model Amerika Serikat memperlihatkan sisi-sisi di mana kebijakan sosial sangatlah berpengaruh dengan suasana politik ideologi Amerika Serikat (DiNitto & Johnson 2016). Selain itu buah kebijakan kesejahteraan sosial ke dalam negara kesejahteraan ala Amerika Serikat terlihat dari beberapa proteksi yang dinamakan *social security* yang mana menjadi perhatian utama dalam pendekatan pluralis (Karger & Stoesz 2018). Berbeda dengan keadaan sosial maupun politik Indonesia, maka tak dapat dipungkiri perbedaan ideologi maupun suasana politik tentu berbeda dengan apa yang dialami dan dijalankan oleh Amerika Serikat, tetapi semua kesejahteraan sosial hendaklah berangkat dari permasalahan sosial, bukan antropologis.

Pandangan antropologisme Indonesia terkait dengan kebudayaan lebih terasa kental daripada pandangan sosiologis, dalam upaya liberalisasi pendidikan di Indonesia misalnya masyarakat lebih senang melihat ragam kebudayaan dan kekayaan kebudayaan yang bahkan cenderung dijadikan alat penutup permasalahan sosial yang utama. Kemiskinan yang terjadi di daerah pinggir Indonesia lebih sering dilihat sebagai suatu *taken granted* atau karena alasan mentalitas, kebudayaan, maupun struktur sosiologis melihat itu sebagai suatu yang apa adanya. Permasalahan sosial merupakan tugas politik untuk menentukan sikap kebijakannya dalam mengembangkan dan menjalankan tugas kebijakan sosial untuk kesejahteraan sosial. Keadaan

Indonesia yang pluralistik, bahkan secara pesimis dikatakan *hybrid hypocrit* tentu memerlukan alat teoritis yang beragam juga terkait dengan kerja kesejahteraan sosial dan politik sebagai instrumen utama kebijakan publik dan kacamata sosial-ekonomi sebagai acuan utama melihat kenyataan sosial.

Karena sifat sosiologis dalam melihat kesejahteraan sosial adalah multidimensional, maka permasalahan politik, terutama yang mengatur sistem politik, ideologi, pendidikan, dan juga perihal kemasyarakatan penting untuk dicermati. Permasalahan yang dialami di Indonesia tidak jauh dari persoalan-persoalan primordialisme dalam kebudayaan bahkan mungkin nilai religiusitas, kemudian feodalisme terhadap nilai-nilai modernitas dan pembangunan, kebijakan, ketimpangan, dan juga terkait dengan kapabilitas. Contoh yang diberikan oleh pemikir seperti Habermas adalah bagaimana melihat *welfare state* tetap dilihat bersamaan dengan aspek sosial dan hak-hak sosial kewargaan (Tweedy & Hunt 1994). Selain tentang sosiologis dalam mempertimbangkan kesejahteraan sosial, negara kesejahteraan dalam politik, khususnya ekonomi-politik juga akan melihat bagaimana sendi-sendi kehidupan kapitalisme sebagai suatu ideologi pasar dan konsekuensinya untuk Indonesia.

Sebagaimana sejarah 'politik kesejahteraan' itu sendiri yang dimulai pasca Perang Dunia ke-2 melalui program pembangunan yang diprakarsai oleh T. H. Marshall tahun 1940. Maka artefak kekuasaan politik kesejahteraan itu berbeda antara Indonesia dengan kebanyakan apa yang telah literatur gambarkan. Habermas menggambarkan bagaimana negara *post-war* kemudian berpindah ke arah *welfarism*, pandangan Habermas itu banyak terjadi dan cocok

untuk kasus di Eropa paska Perang Dunia ke 1 maupun Perang Dunia ke 2. Indonesia yang merupakan negara paska kolonial, kemudian juga kini berada pada zaman paska reformasi dan globalisasi yang begitu deras memerlukan seperangkat teori-teori sosial seperti dari Pierre Bourdieu mengenai linguistis kekuasaan dan simbolitas atas makna-makna fenomena yang politis, juga Habermas dalam melihat kapitalisme dan teori tindakan komunikatifnya, terakhir tulisan ini mengupayakan masuknya pemikiran Amartya Sen sebagai alternatif bagi kehidupan kesejahteraan melampaui relik-relik kapitalisme.

Permasalahan-permasalahan yang ada memang rumit untuk bertemu dengan basis kesejahteraan sosial yang lebih dekat dengan studi kebijakan publik ataupun kebijakan sosial, tetapi proses politik sedemikian yang diakibatkan oleh beberapa sirkulasi sebab-akibat menjadi sumbangan kecil dari tulisan ini. Karena kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang egaliter, kehidupan yang meminta partisipasi masyarakat, maka teori-teori sosial kemasyarakatan, politik, maupun kesejahteraan sosial diperuntukan sebagai kritik atas fenomena antropologisme yang terjadi di Indonesia.

Genealogi kesejahteraan selain dari pandangan Habermas juga terlihat dari diferensiasi sosial negara-negara di dunia ini, terlihat misalnya bagaimana koalisi kesejahteraan Eropa dan negara-negara berkembang melakukan kebijakan publik terkait dengan kesejahteraan. Sementara itu genealogi kesejahteraan adalah sejarah panjang dari koalisi dan perbandingan antara negara-negara berkembang (Pierson 2001: Gough 2004). Secara rasis memang terlihat perbedaan yang

mencolok, tetapi semua itu tetap berpijak pada peralatan sosiologis untuk memeriksa perbedaan-perbedaan kesejahteraan.

Permasalahan Politik dan Demokrasi bagi Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Masalah yang terkait dengan distribusi politik, kepentingan politik, dan pembagian kekuasaan dalam mempertimbangkan proses negara menuju ke arah negara kesejahteraan dilihat dari bagaimana keterikatan politik dengan etos demokrasi. Keterikatan politik dan etos demokrasi adalah dua dimensi dari apa yang disebut sebagai demokrasi kewargaan, keterikatan politik berbicara perihal partisipasi, kepentingan, dan pemilihan pemimpin, sementara etos demokrasi adalah tentang bagaimana masyarakat memahami prinsip-prinsip penting dari nilai-nilai demokrasi (Nie, Junn, & Stehlik-Barry 1996). Artinya permasalahan keterikatan politik dan etos demokrasi merupakan wilayah penting dari proses terjadinya pendidikan politik dan sosialisasi politik bagi masyarakat. Sayangnya hal ini kurang diberlakukan di Indonesia atas dasar politik kekuasaan dan pragmatisme politik masih menjadi biang keladi permasalahan. Kurangnya partisipasi politik, kemudian mudarnya ruang publik, dan kritisisme terhadap kekuasaan turut menyumbang persoalan yang membuat sirkulasi politik menjadi tersendat.

Sirkulasi politik yang tersendat juga ketiadaan kesejahteraan menjadi tantangan besar bagi demokrasi karena turut memperlemah partisipasi politik masyarakat. Sehingga secara tidak langsung tantangan demokrasi di lain pihak adalah juga ketimpangan ekonomi (Shore 2019). Politik yang

diselenggarakan dalam *welfare state* memperlihatkan dua hubungan dan keterkaitan antara kebijakan publik dan kebijakan sosial juga masyarakat harus melihat politik melalui kepercayaan atau *trust* dan pendapatan ekonomi yang didapat oleh masyarakat. Tetapi seperti yang dijelaskan di awal bahwa situasi Indonesia dengan yang digambarkan literatur yang digunakan dalam referensi ini tentu berbeda.

Terkait perbedaan mentalitas kebudayaan yang antropologis, individualisme dan komunitarianisme dalam perdebatan kesejahteraan sosial menjadi permasalahan yang tak dapat dinafikan. Indonesia memiliki kebudayaan yang komunitarian, sementara kebijakan maupun pemikiran kesejahteraan model Amerika Serikat tergantung pada ukuran individualitas. Adapun letak kesejahteraan sosial kebanyakan menggunakan teori atau pendekatan utilitarian sebagai suatu konsep karena memperlihatkan jumlah kebanyakan atau mayoritarianisme. Pemikiran ini juga akhirnya membawa persoalan terkait dengan bagaimana sistem maupun kebijakan demokrasi berlangsung, apakah dalam ranah sosialisme yang memang menjunjung tinggi solidaritas dan komunitarian atau justru demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu lebih dari segalanya.

Kebijakan politik yang dibuat sebagaimana telah digambarkan dalam pemikiran Daren Acemoglu dan James Robinson adalah mengenai bagaimana negara sebagai suatu instrumen kekuasaan tertinggi, yakni negara, telah gagal menjalankan apa yang disebut sebagai kepentingan dan tujuan kesejahteraan (Acemoglu & Robinson 2012). Artinya politik melalui kekuasaan negara adalah instrumen paling penting untuk menyelenggarakan

kekuasaan dan kesejahteraan sebagaimana yang harus dilakukan sebagai tugas utama. Adapun yang dimaksud dengan permasalahan sosial-politik yang dimaksud adalah bagaimana negara mempertahankan posisi-posisi ekstraktif, sebagaimana yang dikritik oleh pandangan Acemoglu dan Robinson, untuk memperkuat sendi-sendi kesejahteraan oligarki, buat masyarakat yang memang mengalami kerugian atau tersisihkan.

Habermas mengingatkan terkait ruang diskursus yang dinamakan ruang publik sebagai alternatif bagi kelas sosial dan mencapai ruang bersama, Acemoglu dan Robinson kemudian paska menulis buku *Why Nations Fail* kemudian menggambarkan bahwa ada koridor sempit yang sulit ditempuh oleh masyarakat ke arah kekuasaan untuk menjalankan sirkulasi kepentingannya. Maka dari itu, istilah yang digambarkan untuk negara yang menyempitkan koridornya adalah *despotic leviathan* (Acemoglu & Robinson 2019). Ini daripada kesejahteraan sosial sebetulnya sedari awal menjelaskan bahwa negara hadir untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial yang memang diakibatkan oleh turbulensi kebijakan sosialnya maupun pasar, sebagaimana yang digambarkan melalui kebijakan-kebijakan sosial di belahan negara manapun.

Tetapi dalam kerangka *despotic leviathan*, negara seakan-akan bersama dengan kepentingan pasar untuk mengecilkan ruang publik melalui *previllage* politik maupun ekonomi. Hal ini tampak dalam rezim ekstraktif dan gambaran mengapa justru di negara berkembang banyak elit yang kaya raya, sementara di negara-negara maju pasar dan kesempatan terbuka lebar untuk dinikmati publik karena koridor yang luas.

Garansi kesejahteraan sosial sebetulnya menimbulkan paradoks antara sang penguasa, sang punya, dengan mereka yang tak punya. Ada sirkulasi yang dipertahankan sebagaimana ditulis oleh buku *Social Welfare: Politics and Public Policy* bahwa perputaran pajak dan bagaimana negara secara simbolis memberikan bantuan kepada yang membutuhkan adalah nuansa yang sangat pragmatis dan paradoksial (DiNitto & Johnson 2016). Contohnya dalam pembayaran pajak bagi yang mampu, kemudian negara mengedarkan itu untuk kepentingan-kepentingan masyarakat sebagaimana dibutuhkan. Asuransi sosial, pekerjaan, dan kesehatan dilakukan oleh negara secara simbolis. Kemudian paradoks lainnya adalah melalui keadaan seperti yang diungkap sebagai makna simbolitas itu negara seperti mempertahankan keadaan ini menjadi suatu sirkulasi berulang.

Kemudian pendidikan politik misalnya tentang bagaimana seseorang kritis dalam ruang publik, seorang politisi memperjuang *moral force* sulit dicari karena nilai-nilai ideologi yang melebur menjadi kepentingan politik semata. Berbeda dengan Amerika Serikat yang masyarakat mengenai istilah spektrum dan *platform* politik dan kebijakan rasional yang akan dilakukan oleh partai Demokrat jika menang dan partai Republik jika menang. Maka pendidikan politik dalam demokrasi dan kesejahteraan dimaksudkan untuk melacak sejauh mana kebijakan politik sebab-akibat sebetulnya rasional dan dapat dijelaskan melalui spektrum-spektrum partai maupun komunitas politik.

Di Indonesia sendiri sejarah memperlihatkan transisi kekuasaan dari otoritarianisme menuju arah reformasi. Dalam dua fase penting itu, terlebih jika

ditarik menggunakan kerangka teoritis paska kolonialisme, memperlihatkan bagaimana makna kesejahteraan berbeda seiring dengan terjadinya fenomena lokal dan global juga kekuasaan politik. Krisis Finansial Asia 1997 hingga Resesi Global 2008 adalah bukti nyata bahwa sosial-politik yang menjelaskan terkait dengan turbulensi dan bahaya-bahaya keamanan sosial menjadi acuan utama atau referensi penting kebijakan sosial berikutnya. Tetapi sebagaimana simbolitas transisi kekuasaan satu ke kekuasaan yang lainnya perubahan kebijakan sosial terjadi tidak dalam rangka ideologis melainkan dalam rangka politis. Dari era Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga kini Joko Widodo semua kebijakan berubah terkait dengan kemenangan dan *platform* partai politik.

Karena ada permasalahan dari segi proses maupun kultural, permasalahan berikutnya yang terjadi akibat dari konsekuensi logis adalah hadirnya kampanye maupun sosialisasi politik untuk program sosial hanya untuk mendongkrak popularitas demi keperluan massa dan kemenangan pemilihan umum (Sumarto 2014). Hal ini semakin memperburuk kinerja rezim kesejahteraan yang berubah demi kepentingan pragmatis, bukan ideologis dan tujuan yang memang didasari pada hakikat negara kesejahteraan.

Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Publik

Kesejahteraan sosial harus dilihat dari *social treatment* atau *social problems* (DuBois & Miley 2005). Di Indonesia ada beberapa program pemerintah dan bahkan aturan konstitusi yang menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Misalnya program pemerintah berupa Pembangunan atau Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial (Suharto 2009). Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia juga tampil sebagai negara kesejahteraan dengan menjamin beberapa garansi sosial seperti kemiskinan yang diperlihara negara, pendidikan bagi anak bangsa, juga keamanan sosial lainnya. Indonesia bukan tanpa pergerakan dan proses maju terkait dengan kebijakan sosial terkait kesejahteraan sosial, akan tetapi pergerakan Indonesia dalam hal mengadakan dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial dinilai lambat dibanding negara ASEAN lainnya (Suharto 2008).

Adapun tujuan utama daripada *welfare state* adalah mereduksi semaksimal mungkin risiko sosial dan ketimpangan ekonomi (Shore 2019). Melalui penamaan itu mungkin Indonesia secara ide telah mencita-citakan hal itu terjadi. Tetapi persoalannya kemudian bagaimana Indonesia memperlihatkan aspek politik dan kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan tersebut. Mekanisme pasar maupun negara dan bagaimana pengaruh fase-fase kekuasaan bekerja akan berpengaruh bagi kebijakan sosial yang diambil. Hipotesanya adalah kebijakan publik yang baru akan menuntut pembentukan politik yang baru pula (Schattschneider 1935). Pandangan itu mungkin bertentangan terkait dengan mentalitas antropologis Indonesia dalam menghadapi permasalahan sosial. Sebagaimana tadi yang dikutip dari Daren Acemoglu dan James Robinson, justru kebijakan publik di Indonesia terasa kental dengan politisasi.

Ruang publik model Habermas sebenarnya menginginkan adanya sirkulasi *feedback* dalam komunikasi publik untuk menyampaikan suatu aspirasi mengenai apa sebetulnya yang

diinginkan atas dasar rasionalisme. Maka sebetulnya konsepsi rasionalisme model Habermasian ini memerlukan juga keadaan sejahtera supaya seorang warga negara dapat masuk di diskursus yang tersedia dan berlangsung di ruang publik. Adanya sirkulasi komunikasi itu bermaksud supaya politik tidak diselenggarakan secara elitis dan birokratis semata melainkan supaya upaya-upaya pencapaian tujuan bernegara dapat terselenggarakan pula.

Diskursus kesejahteraan sosial bukanlah permasalahan lokal ataupun nasional, melainkan permasalahan global yang kini tarik menarik dengan misi isu-isu sosial. Dalam dunia yang telah terintegrasi ke dalam istilah globalisasi seluruh isu maupun tema-tema sentral kehidupan masyarakat memang dilihat dari sifat alamiah dan pendekatan sosiologis. Indonesia tidak dapat lepas dari sebab akibat yang terjadi di dunia internasional dalam membentuk kebijakannya. Alasan yang masuk akal untuk menjelaskan kebijakan sosial terpengaruh oleh konteks globalisasi adalah bagaimana ide dan diskursus perihal perkembangan kebijakan sosial negara dipengaruhi oleh kejadian-kejadian external untuk memperkuat basis keamanan sosial negara dalam tatanan sosial (Kaasch 2015). Adapun permasalahan-permasalahan penting yang dibahas dalam kesejahteraan sosial yaitu terkait dengan bagaimana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi basis utama bukan kekayaan kebudayaan maupun keanekaragaman tradisi yang sebetulnya bukan penjelasan primer dalam menanggapi persoalan di Indonesia.

Indonesia sendiri secara kebijakan kesejahteraan sosial maupun proteksi sosial selalu berkaitan dengan nilai-nilai sejarah pra reformasi dan

paska reformasi yang bergulir setelah Krisis Finansial Asia yang melanda tahun 1997. Indonesia kemudian bergerak dengan memiliki aturan terkait dengan Jaminan Sosial Nasional dalam UU No. 40 Tahun 2004 (Sumarto 2013: Suryahadi 2017). Ada keterikatan antara demokrasi dan demokratisasi melalui fenomena ini di mana reformasi merupakan suatu perubahan politik paska politik Soeharto untuk menciptakan stabilisasi maupun peningkatan ekonomi. Ada harapan dan keserasian yang dicita-citakan dan diupayakan dari transisi demokrasi Indonesia dengan peningkatan kesejahteraan.

Kehidupan sosial-politik Indonesia paska reformasi bukan tanpa ujian maupun cobaan, fenomena Resesi Global 2008 adalah contoh nyata bahwa semua negara di dunia perlu memikirkan ulang kebijakan-kebijakan ekonominya supaya tidak mengalami turbulensi yang berpengaruh secara signifikan maupun berbahaya. Maka paska Resesi Global 2008 proteksi sosial menjadi tren yang berkembang pesat juga menjadi gerakan sosial maupun politik yang inisiatif (Deacon 2013). Negara memang secara sederhananya hadir untuk mereka yang tersisihkan dari dominasi dan perputaran pasar yang sulit dijangkau oleh mereka yang tak berkemampuan. Ini terkesan menghasilkan dan menetapkan keadaan di mana kelas sosial dan perbedaan itu tetap terjadi. Tetapi di alternatif kesejahteraan yang melampaui nilai keuntungan kapitalisme ada upaya ekonomi terkait dengan sejauh mana kapabilitas dan kemampuan bekerja, bukan saja terkait dengan keuntungan kapitalistik.

Rezim kesejahteraan di Indonesia yang berubah-ubah setiap silih bergantinya pemegang tampuk

kekuasaan dan partai yang berkuasa mengakibatkan perdebatan perihal kesejahteraan menjadi semakin tajam dan memerlukan analisa yang mendalam dengan sifat sosiologis yang multidimensional. Misalnya dalam menerangkan perihal basis keutamaan daripada kebijakan sosial beberapa tokoh kemudian menjadikan makro ekonomi sebagai landasan untuk menciptakan kebijakan sosial (Croissant 2004: Gough 2013). Dalam setiap perubahan dan pergantian rezim, maka rezim kesejahteraan pun ikut berubah tetapi yang terpenting adalah memeriksa hambatan kesejahteraan yang terjadi di Indonesia. Rezim kesejahteraan di Indonesia sebagai negara berkembang perlu dilihat dari kacamata *citizenship* yang memiliki pendekatan komunitarianisme dan kekuatan pasar, alternatif pendekatan ini melihat idealisasi, realitas, dan hidup sosial sehari-hari. (Yuda 2018). Bahkan, pandangan rezim kesejahteraan yang dilihat dari aspek *citizenship* memiliki keutamaan di mana karakter kuat rezim kesejahteraan justru terletak pada komunitarianisme karena komunitas sosial memiliki kesempatan untuk dipenuhi kebutuhannya.

Adapun yang dimaksud dengan rezim kesejahteraan adalah gambaran tentang institusi politik, ekonomi, maupun lapangan sosial yang memproduksi barang publik dan tata kelola untuk didistribusikan dalam bentuk kebijakan sosial (Taylor-Gooby 1991: Gough 2013). Politik, ekonomi, dan lapangan sosial harus dilihat secara demokratis alias kewargaan ketimbang elitisme. Hal ini terkait dengan bagaimana negara menyelenggarakan kesejahteraan melalui nilai etis, bukan nilai politis. Tetapi idealnya memang secara ideologis perdebatan maupun kebijakan terkait dengan kesejahteraan

sosial itu absen karena merujuk pada pandangan pesimis terkait Indonesia.

Logika kesejahteraan yang berada di bawah rezim produktivisme paska kehidupan politik otoritarianisme Soeharto adalah pembangunan ekonomi dan kapabilitas konsumsi (Alpaster 2006; Holiday & Wilding 2003). Maka dari itu harus ada alternatif konsep kesejahteraan di tengah keadaan pluralistik dan pendekatan yang beragam terkait dengan kesejahteraan sosial di Indonesia. Sementara untuk kebijakan sosial sebagai kebijakan publik maka tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan kapabilitas untuk memproduksi elemen-elemen yang terkait dengan kemasyarakatan (Holiday 2000). Akar studi kesejahteraan sosial yang diawali dari kolonialisme dalam upaya negara penjajah mengurus para pekerja di negeri jajahan kini harus bertransformasi ke arah kebijakan sosial yang semakin melebar ke arah pembangunan khususnya untuk dunia selatan (Midgley 2019).

Warisan politik yang feodalistik dan sistem demokrasi yang belum matang atau dewasa menjadi bagian dari sejarah yang membentuk politik kontemporer di Asia (Rodan & Jayasuriya 2009). Ini dapat dianalisa melalui sosiologi dasar yaitu konsep Weberian yang menekankan aspek legitimasi dan kharisma sebagai alat politik untuk meraih suatu pengesahan ataupun simbolitas. Konsekuensi logis daripada warisan feodalistik dan kultur demokrasi yang belum matang ditambah dengan sumbangan dari konsep Weberian adalah bagaimana akhirnya pemerintah memainkan peranan patrimonialisme melalui institusinya sendiri (Hadiz 2003). Patrimonialisme terinstitusikan di rezim politik yang *hybrid* karena nilai

demokrasi terkikis, otoritarianisme, dan feodalisme (Yuda 2018).

Teori Melihat Fenomena

Kapitalisme kini telah mempengaruhi semua sistem kehidupan maupun tata ruang politik, maka kesejahteraan model kapitalisme merupakan tren global pasca perang dingin sebagaimana sejarah daripada politik kesejahteraan itu sendiri. Akan tetapi Habermas berpendapat lain mengenai kapitalisme. Baginya kapitalisme adalah ideologi pasar atau mayoritas yang kemudian mendistorsi moral maupun etika kehidupan sosial (Habermas 1975; Held 1980). Kemudian Habermas melihat fenomena sosial atau yang sering disebut sebagai *lifeworld* melalui kolonialisme yang dilakukan oleh kapitalisme untuk mendistorsi ruang-ruang kehidupan (Habermas 1987). Habermas dan Bourdieu sama-sama melihat linguistik maupun tindakan komunikatif atau bahasa sebagai suatu ruang sosial yang masuk akal untuk menerangkan sisi sosiologis. Sebagaimana Bourdieu, dalam menjelaskan konteks keindonesiaan yang kental dengan nuansa pendekatan Weber, maka bahasa dan simbolitas merupakan aspek kekuatan bahkan kekuasaan (Bourdieu 1992). Kemudian tindakan komunikatif itu terjadi di ruang publik yang merngedepankan egalitarianisme (Habermas 1992). Perdebatan antara kapitalisme dan marxisme menjadi usang karena adanya konsep *welfare state*.

Turbulensi kapitalisme yang telah terintegrasi ke dalam ranah global mengakibatkan suatu pertanyaan yang radikal terkait bagaimana negara justru harus membersihkan puing-puing kerusakan yang diakibatkan oleh sistem pasar yang riuh dan ramai bagi

masyarakatnya yang terpinggirkan entah oleh sistem pasar maupun kegagalan negara. Pandangan ini melihat fenomena ataupun kenyataan sosial dari perspektif yang plural. Peralpnya dalam menjelaskan kerangka teoritis yang ideal, kapitalisme dan neoliberalisme adalah suatu kompas kesejahteraan yang banyak digunakan sebagai tren global dewasa ini.

Edi Suharto melihat neoliberalisme sebagai suatu jebakan, mengikuti pandangan Stiglitz dalam aspek globalisasi dan jebakan-jebakan kesejahteraan ala-ala Barat (Stiglitz 2002). Kemudian kultur politik yang berbeda telah mengundang banyak perhatian dari kritik terkait dengan kebijakan sosial untuk menghasilkan kesejahteraan (Yuda 2018). Khusus untuk kasus di Asia Tenggara, Indonesia, pada umumnya kawasan Asia secara umum memiliki kekhasan dan keunikan sendiri terkait dengan kultur politik dan korelasinya dengan studi kesejahteraan. Misalnya dalam membedah fenomena dan kultur politik yang feodalisme, komunitarianisme, bahkan patrimonialisme dilihat dari suatu konstruksi kultural yang dibangun sebagai kekuatan utama kekuasaan politik di banyak negara Asia. Kapitalisme yang mengganggu nilai individualisme, dengan mimpi negara kesejahteraan yang biasanya bersifat komunitarian seakan-akan bertolak belakang satu sama lain. Hal ini adalah hal yang lumrah dan lazim ditemukan dalam suatu perdebatan teoritis mengenai bentuk ideal dari kesejahteraan.

Dari penjelasan terkait dengan bagaimana topangan ekonomi ke dalam sosial-politik, fakta bahwa politik simbolitas, linguistik, maupun kekuasaan dikuasai oleh tipikal yang feodal maupun patrimonial sekali lagi

menegaskan bahwa pendekatan sosiologis dan genealogi dengan politik merupakan pukulan keras terhadap narasi besar kebudayaan yang selalu mengisi ruang diskursus tentang permasalahan sosial di Indonesia. Ada keterkaitan yang berkelindan bagaimana sebetulnya kebudayaan maupun tradisi yang dianggap kaya dan dimaknai atau dipahami apa adanya merupakan bentuk kritik dari paska kolonialisme dan tradisi otoritarianisme yang sangat panjang.

Fenomena kesejahteraan ini perlu dilihat dari dua pendekatan sebagai upaya untuk memahami apa yang dimaksud sebagai rezim kesejahteraan atau *welfare regime*, pertama adalah kenyataan status negara berkembang dan perubahan yang terjadi secara institusional. Simulasi perkembangan kesejahteraan dapat dilihat dari perkembangan ekonomi, tekanan pasar global, dan kebijakan sosial yang bersifat universal (Sumarto 2017). Sebab tak dapat dipungkiri bahwa pasar global merupakan suatu gerak dinamis yang berpengaruh bagi keadaan nasional maupun regional. Di Indonesia sendiri, Mulyadi Sumarto menjelaskan terkait bagaimana transformasi negara berkembang dalam rezim kesejahteraan yang berubah melalui faktor eksternal maupun internal yang terjadi di suatu negara khususnya Indonesia. Dalam pendekatan komparatif keadaan Indonesia sering terkait dengan model pembangunan Asia Timur karena dianggap berdekatan dengan beberapa kritik yang dapat diuraikan dalam persoalan kesejahteraan.

Berkaitan dengan sejarah Indonesia, maka Indonesia sudah mengalami setidaknya tiga fase dan itu semua menentukan sikap rezim kesejahteraan berlangsung, dimulai dari

periode kepemimpinan Soekarno, kepemimpinan Soeharto, dan kepemimpinan paska Soeharto hingga hari ini (Sumarto 2017). Pandangan itu sebagaimana merujuk pada pendekatan keunikan suatu wilayah maupun nasional karena rezim kesejahteraan harus dilihat dari konteks lokal (Wood & Gough 2006). Kategori negara-negara berkembang dalam mengurus rezim kesejahteraan dapat dilihat apakah suatu negara sedang dalam masa yang dinamakan *productivist* yaitu ketika negara memiliki tipikal yang ditenggarai oleh pertumbuhan ekonomi, kekuatan negara, sistem ekonomi-politik yang stabil, dan orientasi terhadap dukungan finansial dari Barat (Holiday 2000: Sumarto 2017). Indonesia sendiri mengalami fase *productivist* di awal-awal kemerdekaan hingga Soeharto sampai pasar global kemudian memberikan tekanan paska Krisis Finansial Asia tahun 1997.

Adapun fase-fase setelah *productivist* ada juga yang menganalisa terhadap suatu negara dari pandangan *developmentalist*, *redistribution*, *inclusive*, bahkan *protective* (Kwon 2005: Lin & Wong 2013: Kühner 2015). Setelah dijelaskan bagaimana Indonesia memiliki budaya politik yang relatif patrimonial sebetulnya dapat juga dikatakan Indonesia sedang bertransisi ke arah *developmentalist* karena sifatnya yang sentralistik dari masa ke masa. Tetapi kemudian paska Krisis Finansial Asia tahun 1997 kedua rezim kesejahteraan itu diancam oleh kekuatan pasar. Transisi Indonesia paska kekuasaan Soeharto kemudian masuk pada ranah liberal-informal yang secara kebijakan maupun wacana, rezim kesejahteraan sosial itu terbentuk dan diselenggarakan karena tekanan pasar global (Wood & Gough 2004).

Alternatif Kesejahteraan

Setelah melihat bagaimana fenomena sosial, politik, dan ekonomi berkelindan dalam diskursus kesejahteraan sosial maka jelas bahwa rezim neoliberalisme atau kapitalisme yang mengalami turbulensi pada tahun 2008 itu membawa tulisan ini pada suatu alternatif untuk menengahi perdebatan maupun bentuk ideologisasi yang dapat dipertemukan satu sama lain. Dalam contoh kategorisasi kemiskinan, ada pendapat yang menyatakan bahwa penyebab kemiskinan ada empat macam, kekurangan *human capital*, kultural, eksploitatif, dan struktural sosiologis (DiNitto & Johnson 2016). Pandangan ini sebetulnya merupakan kritik dasar daripada bagaimana negara seharusnya melihat situasi sosial maupun ekonomi masyarakat yang plural. Komparatisme terkait dengan bagaimana suatu negara berhasil dan mengapa negara yang lain gagal perlu menjadi upaya pembenahan diri terkait dengan kebijakan maupun kehendak politik yang akan dituju.

Pemikiran Amartya Sen menarik untuk dibahas terkait bagaimana pemikirannya terkait dengan kesejahteraan sosial. Dalam menengahi perdebatan antara komunitarianisme dan individualisme, Amartya Sen kemudian berpendapat bahwa kesejahteraan individu itu akan berakibat pada kesejahteraan kolektif (Sen 2002). Pemikiran semacam ini tidak lepas dari kenyataan intelektualisme yang dimiliki oleh basis pemikiran sosialisme, liberalisme-libertarianisme, maupun utilitarianisme. Aspek individu tidak boleh dinafikan di dalam menjelaskan terkait dengan bagaimana kesejahteraan itu mendapatkan porsi dan nilainya sendiri. Perkembangan individualitas dengan nilai-nilai kebebasan, kesempatan

mencapai tujuan, dan diperlakukan secara sama akan menciptakan *citizenship* yang baik dan inilah makna primer dari nilai demokrasi dan kesejahteraan (Marshall 2009).

Kemudian dalam pendekatan etika ekonomi terbaiknya, Amartya Sen tak lupa untuk menyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu harus juga melibatkan pembangunan manusia (Sen 1993). Hal tersebut berkenaan dengan bagaimana sebetulnya manusia itu memiliki martabat yang agung untuk memperjuangkan kesejahteraannya sendiri bukan sebagai objek pasar yang dapat dieksploitasi dan dihargai murah. Sebagaimana sebagai suatu alternatif layaknya pendekatan itu berdiri di tengah-tengah untuk mengupayakan adanya kebaikan dan nilai-nilai keadilan dari semua pendekatan yang ada.

Dalam etika ekonomi berikutnya secara detail dan rinci Amartya Sen menjelaskan bahwa dalam kebijakan kesejahteraan hendaknya pembedayaan perempuan harus diutamakan (Sen 1985: 1992). Hal ini terkait dari pemikiran feminisme yang beranjak dari kenyataan bahwa kesejahteraan keluarga dimulai dari inisiatif dan perhatian seorang perempuan. Tetapi perlu juga diingat bahwa pandangan feminisme tidak saja mengkritik patriarkisme rumah tangga yang didominasi oleh laki-laki, tapi juga struktur sosial maupun kebijakan sosial yang standarnya dikuasai oleh hasrat dan kebutuhan laki-laki semata. Orientasi kebijakan sosial melalui pandangan feminisme ini dapat memperlihatkan *ethics of care* ketimbang *ethics of right* yang terlalu mendominasi cara pikiran penentu kebijakan.

Sementara dalam upaya untuk menempatkan kapitalisme di satu sisi dan batas-batas kategori

ketidakmampuan atau kemiskinan, Amartya Sen berpendapat bahwa sesungguhnya kemiskinan itu ialah keadaan seseorang tidak memiliki kapabilitas (Sen 1999). Pandangan tersebut menengahi perdebatan antara keuntungan kapitalisme dengan kebutuhan serta kapabilitas sebagai suatu upaya pemberdayaan diri. Respon negara terkait bagaimana seharusnya berdiri pada posisi yang moderat untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial yang lebih tinggi, melebar, dan melihat ke bawah.

Mempelajari Amartya Sen untuk studi kesejahteraan sosial memang menarik dibahas karena hendak menyampaikan suatu pendekatan alternatif dan melampaui beberapa multidimensi yang mendudukan bentuk-bentuk perdebatan belakangan ini (Arrow 1999). Apabila kita merujuk pada karya Amartya Sen yang berjudul *Collective Choice and Social Welfare* maka baginya pilihan sosial masyarakat haruslah menjadi bagian dari terbentuknya tatananan sosial.

Kendati pasar mengalami kegagalan negara kesejahteraan harus tetap ada untuk memastikan kebaikan-kebaikan hidup (Greve 2019). Negara kesejahteraan harus memastikan kehidupan yang setara, sebagaimana demokrasi menghendaki yang demikian karena hanya dalam kesetaraan seseorang dapat lebih sejahtera dan ketimpangan justru membawa dampak negatif (Wilkinson & Pickett 2010: Stiglitz 2012). Di tengah abad ke-21 ini para pemikir berupaya untuk mencari alternatif bagi kesejahteraan selain Amartya Sen, dan terkait konsepsi *welfare state*, Stiglitz menjelaskan suatu tantangan di mana negara kesejahteraan perlu mengalami perubahan yang signifikan paska perdebatan yang ditimbulkan oleh neoliberalisme

mengalami turbulensi (Stiglitz 2018). Neoliberalisme yang mengutamakan kekuatan pasar dan dasar-dasar individualisme bertemu dengan konsep negara kesejahteraan yang harus menempuh jalan kolektif. Stiglitz kemudian mengatakan bahwa negara kesejahteraan harus memiliki inovasi dan lebih dinamis (Stiglitz 2015).

Pandangan Amartya Sen dan Joseph E. Stiglitz merupakan respon terkait bagaimana rezim pasar dalam kerangka neoliberalisme berhadapan dengan konsep negara kesejahteraan. Memang upaya yang paling nyata untuk kesejahteraan model Indonesia adalah model campuran yang moderat, tidak terlalu mengamini ekonomi pasar secara radikal juga merkantilisme secara ketat. Adanya nilai demokrasi dan kesejahteraan menjadi titik tumpu untuk menjadikan kebijakan publik dan posisi negara netral dan dapat menumbuhkan harapan terkait dengan berkembangnya kesejahteraan sosial.

Referensi

- Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Redfern: Currency.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. (2019). *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. New York: Penguin.
- Alpaster, C. (2006). "The East Asian Welfare Model", *International Journal of Social Welfare*, 15(4), pp. 290-301.
- Arrow, K. J. (1999). "Amartya K. Sen's Contributions to the Study of Social Welfare", *The Scandinavian Journal of Economics*, 101(2), pp. 162-172.
- Bourdieu, P. (1992). *Language and Symbolic Power*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Croissant, A. (2004). "Changing Welfare Regimes in East and Southeast Asia: Crisis, Change, and Challenge", *Social Policy & Administration*, 38(5), pp. 504-524.
- Deacon, B. (2013). *Global Social Policy in the Making: The Foundations of the Social Protection Floor*. Bristol: Policy Press.
- DiNitto, D. M., & Johnson, D. H. (2016). 8th Edition. *Social Welfare: Politics and Public Policy*. New York: Pearson.
- DuBois, B., & Miley, K. K. (2005). 5th Edition. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn & Bacon.
- Gough, I., Wood, G., Barrientos, A., Bevan, P., Davis, P., & Room, G. (2004). *Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa, and Latin America*. Oxford: Oxford University Press.
- Greve, B. Ed. (2019). 2nd Edition. *Routledge Handbook of the Welfare State*. London: Routledge.
- Habermas, J. (1975). *Legitimation Crisis*. Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1987). Volume II. *The Theory of Communicative Action Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Habermas, J. (1992). *The Structural Transformation of Public Sphere*. Massachusetts: MIT Press.
- Hadiz, V. (2003). "Reorganizing political power in Indonesia: A reconsideration of so-called democratic transitions", *The Pacific Review*, 16(4), pp. 591-611.

- Held, D. (1980). *Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas*. California: University of California Press.
- Holiday, I. (2000). "Productivist welfare capitalism: social policy in East Asia", *Political Studies*, 48(4), pp. 706-723.
- Holiday, I., & Wilding, P. (2003). *Welfare Capitalism in East Asia: Social Policy in the Tiger Economies*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kaasch, A. (2015). *Shaping Global Health Policy: Global Social Policy, Actors, and Ideas about Health Care Systems*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kaasch, A., & Martens, K. Eds. (2015). *Actors and Agency in Global Social Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Karger, H. J., & Stoesz D. (2018). 8th Edition. *American Social Welfare Policy: A Pluralist Approach*. New York: Pearson.
- Kenneth, P. Ed. (2013). 2nd Edition. *A Handbook of Comparative Social Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Kühner, S. (2015). "The productive and protective dimensions of welfare in the Asia-Pacific: Pathways toward human development and income equality?", *Journal of International and Comparative Social Policy*, 31(2), pp. 51-73.
- Kwon, H. (2005). "Transforming the developmental welfare state in East Asia", *Development and Change*, 36(3), pp. 77-97.
- Lin, K., & Wong, C. K. (2013). "Social policy and social order in East-Asia: on evolutionary view", *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 23(4), pp. 70-84.
- Manza, J., & Sauder, M. (2009). *Inequality and Society: Social Science Perspective on Social Stratification*. New York: W. W. Norton.
- Midgley, J., Surender, R., & Alfers, L. Eds. (2019). *Handbook of Social Policy and Development*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Nie, N., Junn, J., & Stehlik-Barry, K. (1996). *Education and Democratic Citizenship in America*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ocampo, J. A., & Stiglitz, J. Eds. (2018). *The Welfare State Revisited*. New York: Columbia University Press.
- Pierson, P. (2001). *The New Politics of the Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.
- Rodan, G., & Jayasuriya, K. (2009). "Capitalist development, regime transitions, and new forms of authoritarianism in Asia", *The Pacific Review*, 22(1), pp. 23-47.
- Schattsneider, (1935). *Politics, Pressure, and the Tariff*. New York: Prantice-Hall.
- Sen, A. (1985). *Commodities and Capabilities*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, A. (2002). "Responses to commentaries", *Studies in Comparative International Development*, 37(2), pp. 78-86.
- Sen, A., & Nussbaum, M. Eds. (1993). *The Quality of Life*. Oxford: Oxford University Press.
- Shore, J. (2019). *The Welfare State and the Democratic Citizen: How Social Policies Shape Political*

- Equality*. New York: Palgrave Macmillan.
- Stiglitz, J. (2002). *Globalization and its Discontent*. New York: W.W Norton.
- Stiglitz, J. (2012). *The Price of Inequality*. London: W. W. Norton.
- Stiglitz, J. (2015). "Inequality and Economic Growth", *The Political Quarterly*, 86, pp. 134-155.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, M. (2013). "Welfare Regime, Social Conflict, and Clientism in Indonesia", *PhD Thesis*. Australian National University.
- Sumarto, M. (2014). *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumarto, M. (2017). "Welfare Regime Change in Developing Countries: Evidence from Indonesia: *Social Policy & Administration*, 51(6), pp. 940-959.
- Taylor-Gooby, P. (1991). "Welfare State Regimes and Welfare Citizenship", *Journal of European Social Policy*, 1(2), pp. 93-105.
- Tweedy, J., & Hunt, A. (1994). "The Future of the Welfare State and Social Rights: Reflection on Habermas", *Journal of Law and Society*, 21(3), pp. 288-316.
- Wilkinson, R., & Pickett, K. (2010). *The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger*. New York: Bloomsbury Press.
- Wood, G., & Gough, I. (2006). "A comparative welfare regime approach to global policy", *World Development Journal*, 34(10), pp. 692-712.
- Yi, I. Ed. (2017). *Towards Universal Health Care in Emerging Economies: Opportunities and Challenges*. New York: Palgrave Macmillan.
- Yuda, T. K. (2018). "Welfare regime and the patrimonial state in contemporary Asia: visitng Indonesian cases", *Journal of Asian Public Policy*, 12(3), pp. 351-365.
- Yuda, T. K. (2018). "Welfare Regime Transformation in Indonesia: A Citizenship Debate", *MASYARAKAT Jurnal Sosiologi*, 23(2), pp. 143-165.